

Ruang Lingkup Desentralisasi Manajemen Pendidikan

Dianika Putri Aulia, Anne Effane

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru

Universitas Djuanda

Jln. Tol Ciawi No.1, Ciawi-Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email : anne.effane@unida.ac.id

Abstrak

Decentralization of education management is essentially the authority of the central government to provide full abundance to regional governments, to manage their own households in all matters. The affairs in question are about all matters related to education management. All matters of abundance are given to regional autonomy, unless there are certain affairs which are still part of government affairs, or the right of the government itself to manage everything. The scope of education management is one that is related to various parties and is multidisciplinary. These multidisciplinary disciplines include management of education and educational staff, in addition to student management and curriculum management, financing management, facilities and infrastructure management, school management, principal management and community relations management. Everything is related to one another so that the decentralization of education management is implemented properly. This scope is also still divided into several sections, among which there is scope according to work area. Where, within this scope management is divided into several classes including management of the whole country, management of one province, management of one work unit and class management. Next, there is scope according to cultivated objects, including student management, education personnel management, management of facilities and infrastructure, administrative management, and financing management, and finally there is scope related to activity functions where this relates to planning, organizing, directing, coordinate, communicate, and monitor or evaluate. The process of processing the scope in the decentralization of education certainly has many obstacles. To see the success of the scope of decentralization of education management, this research seeks quantitative data, which collects data, analyzes and provides conclusions about the success of the scope of decentralization of education.

Key words: scope of decentralization, decentralization of education management

Abstrak

Desentralisasi manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan keluasaan pemerintah pusat memberikan kelimpahan penuh kepada pemerintah daerah, untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan. Urusan yang dimaksud adalah tentang semua hal yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Semua urusan kelimpahan tersebut diberikan kepada otonomi daerah, kecuali ada urusan-urusan tertentu yang menjadi masih bagian dari urusan pemerintah, atau hak pemerintah sendiri untuk mengatur semuanya. Ruang lingkup manajemen pendidikan merupakan salah satu manajemen yang berkaitan dengan banyak sekali pihak dan multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu tersebut diantaranya adalah manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, selain itu ada manajemen kesiswaan, dan manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen sekolah, manajemen kepala sekolah dan manajemen hubungan masyarakat. Semuanya saling berkaitan satu sama lain agar desentralisasi manajemen pendidikan terlaksana dengan baik. Ruang lingkup ini juga masih terbagi kedalam beberapa bagian, diantaranya ada ruang lingkup menurut wilayah kerja. Dimana, dalam ruang lingkup ini manajemen dibagi kedalam beberapa kelas diantaranya ada manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja dan manajemen kelas. Berikutnya ada ruang lingkup menurut obyek garapan, diantaranya ada manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana, dan manajemen pembiayaan, dan terakhir ada ruang lingkup yang berkaitan dengan fungsi kegiatan dimana hal ini berkaitan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Proses pengolahan ruang lingkup di dalam desentralisasi pendidikan pasti memiliki kendala yang tidak sedikit. Untuk melihat keberhasilan ruang lingkup desentralisasi manajemen pendidikan penelitian ini mencari data dengan secara kuantitatif, dimana mengumpulkan data-data, menganalisis dan memberikan kesimpulan tentang keberhasilan ruang lingkup desentralisasi pendidikan tersebut.

Kata kunci: *ruang lingkup desentralisasi, desentralisasi manajemen pendidikan*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (SDA) melalui kegiatan pengajaran. Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat pesanan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Meningkatkan sebuah mutu pendidikan adalah keharusan, untuk bisa mencapainya, perlu dibutuhkan adanya upaya perbaikan di dalam semua sektor yang mendukung

dunia pendidikan itu sendiri. Banyak sekali hal yang mendukung keharusan terlaksananya pendidikan yang baik seperti sarana prasarana, pembiayaan, pengaturan kepala sekolah dalam lembaganya, guru yang profesional dan masih banyak hal yang harus diatur atau dimanajemen dalam dunia pendidikan ini, khususnya di dalam desentralisasi manajemen pendidikan, dimana hal ini membutuhkan ruang lingkup khusus yang baik agar desentralisasi manajemen pendidikan bisa terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pendidikan pada dasarnya harus di landasi dengan sebuah manajemen, atau yang lebih dikenal sebagai manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki arti tersendiri, manajemen dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan universal, sebab keduanya merupakan sebuah aktivitas yang terus menerus berkelanjutan terhadap manusia dan kehidupannya.

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2014:1), manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Artinya, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Adapun, hal-hal yang diatur adalah unsur-unsur manajemen, seperti men, money methods, materials, machines, and market yang disingkat dengan 6M. Ke6 M tersebut diharapkan dapat berdaya guna, berhasil, terintegrasi, dan terkordinasi untuk mencapai tujuan yang maksimal. Cara mengatur sebuah manajemen adalah dengan urutan fungsi –fungsi manajemen seperti *planning, organizing, directing, dan controlling*.

Menurut Hasibuan, (2014:4-3) manajemen diperlukan untuk menuntaskan pekerjaan yang sulit menjadi mudah, adanya pembagian kerja dalam tim, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Selain itu, penerapan manajemen yang baik untuk memperoleh hasil yang baik, perlunya penetapan tujuan dan usaha dalam prosesnya, perlunya kemajuan untuk pertumbuhan, pencapaian tujuan secara teratur, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan, dan manajemen selalu dibutuhkan di setiap kerja sama sekelompok orang.

Meningkatkan sebuah mutu pendidikan adalah sebuah keharusan, untuk meningkatkan mutu itu sendiri, kita membutuhkan adanya upaya perbaikan di semua bidang yang mendukung dunia pendidikan tersebut. Prasyarat dalam meningkatkan mutu dari sebuah pendidikan adalah adanya sarana prasarana yang memadai, diantaranya yaitu gedung pendidikan yang baik, terjaga dan terawat, terdapat fasilitas perpustakaan, sistem pendidikan yang baik, anggaran yang cukup dan tenaga pendidik yang profesional yaitu guru.

Sejak memasuki zaman reformasi semua sendi birokrasi di Indonesia juga turut berubah. Dari dulu semua hal bernafaskan sentralistik atau semua hal diatur oleh pusat, namun

sedikit demi sedikit bergeser pada paradigma desentralistik atau pelimpahan wewenang untuk mengatur sistem sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Proses desentralisasi memuai harapan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kreativitas guru, sebab melalui desentralisasi pendidikan guru dapat mengembangkan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peneliti melihat bahwa semua hal yang sudah dijelaskan diantara manajemen pendidikan dan desentralisasi membutuhkan sebuah ruang lingkup untuk mengatur dan mengarahkan sebuah manajemen pendidikan.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan teknik studi literatur. Mencari data-data dari berbagai sumber untuk bisa mencari informasi dengan menyelesaikan penjelasan mengenai ruang lingkup desentralisasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana berlangsungnya sebuah manajemen pendidikan di dalam sebuah ruang lingkup desentralisasi pendidikan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Ruang lingkup manajemen pendidikan merupakan sebuah manajemen pendidikan yang berkaitan atau berhubungan dengan banyak sekali pihak dan multidisiplin ilmu. Multi disiplin ilmu tersebut, diantara lainnya adalah manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, ada manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen sekolah, manajemen kepalasekolah, dan manajemen hubungan masyarakat. Di dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, sedangkan manajemen kesiswaan berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan terhadap anak didik atau peserta didik sebagai input dan output sistem.

Berikut ini adalah sebuah table dari ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu :

| Menurut Wilayah Kerja | Menurut Obyek Garapan | Menurut Fungsi Kegiatan |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| • Manajemen seluruh negara | • Manajemen siswa | • Merencanakan |
| • Manajemen satu provinsi | • Manajemen tenaga pendidikan | • Mengorganisasikan |
| • Manajemen satu unit kerja | • Manajemen sarana dan prasarana | • Mengarahkan |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| • Manajemen kelas | • Manajemen tata laksana pendidikan | • Mengordinasikan |
| | • Manajemen pembiayaan | • Mengkomunikasikan |
| | • Manajemen hubungan masyarakat | • Mengawasi atau mengevaluasi |

1. Ruang Lingkup Desentralisasi Pendidikan Berdasarkan Obyek Garapan

Multi disiplin ilmu dalam ruang lingkup manajemen pendidikan diantaranya adalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebuah aktifitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan yang memegang peranan strategis terutama di dalam upaya pembentukan watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan hal lain yang diinginkan. Peranan pendidik di dalam masyarakat Indonesia tetap masih dominan, sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis, di dunia pendidikan tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreati, dan berprestasi.

Secara garis besar aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah:

1. Merencanakan kebutuhan pegawai
2. Menyeleksi calon pegawai
3. Penempatan sesuai dengan formasi
4. Merangsang gairah kerja dengan menciptakan kondisi atau suasana kerja yang baik
5. Memelihara kesejahteraan pegawai atau pemberian kompensasi
6. Meningkatkan mutu pegawai baik melalui pembinaan
7. Mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai untuk memperoleh data dalam rangka peningkatan pangkat pegawai
8. Menata pemutusan hubungan kerja dengan pegawai.

Selain adanya peran pendidik dan tenaga kependidikan, runag lingkup desentralisasi manajemen pendidikan juga berkaitan dengan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan memiliki pengertian yaitu suatu penataan atau pengaturan dalam segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, baik dimulai dari amsuknya peserra

didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga kependidikan. Peserta didik merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya sebuah pendidikan di sekolah. tanpa peserta didik, keberlangsungan sebuah proses belajar dan mengajar tidak akan berlangsung dengan baik.

Kepala sekolah juga menyebutkan bahwa perencanaan manajemen kesiswaan dilakukan mulai dari proses siswa masuk ke sekolah hingga siswa lulus dan bahkan jika dibutuhkan perencanaan manajemen kesiswaan berlangsung hingga siswa telah menjadi alumni.

Sekolah mendata ukuran sekolah, kelas, jumlah kelas, kebutuhan siswa dan guru hingga staf, serta rasio jumlah murid dan guru. Melalui data tersebutlah kepala sekolah menyebutkan bahwa pihak sekolah baru bisa menganalisa kebutuhan dalam pengelolaan manajemen kesiswaan yang berlangsung di sekolah.

Selanjutnya hal yang berhubungan dengan ruang lingkup manajemen pendidikan adalah manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009: 3).

Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka untuk mewujudkan ketercapaian tujuan dari sebuah kurikulum. Dalam sebuah pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum dalam satuan tingkat pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, sebuah otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi suatu lembaga pendidikan, dan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Manajemen kurikulum memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat, dimaksudkan agar dapat memahami, membantu dan mengontrol implementasi kurikulum. Sehingga, lembaga pendidikan selain harus kooperatif, juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi sebuah kebutuhan kurikulum tersebut, mendisain kurikulum, mengendalikan, serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

- a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
- b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum

- c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.
- e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum (Rusman, 2009: 4).

Berikutnya ada manajemen pembiayaan dalam pendidikan, pembiayaan pendidikan adalah biaya yang sangat penting dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. biaya ini sangat penting, sebab semua hal yang berhubungan dengan operasional sekolah membutuhkan sebuah biaya untuk menjalankannya, sekolah mendapat biaya dari pemerintah melalui manajemen desentralisasi yang diselenggarakan dalam APBN dan APBD baik sekolah yang ada di kota maupun didaerah. Biaya-biaya yang diberikan pemerintah untuk dibelanjakan sesuai dengan arahan dari pemerintah, tentunya semuanya harus dipertanggung jawabkan dari pemakaian biaya tersebut. Sekolah tidak hanya mendapatkan biaya dari pemerintah saja, masih banyak sekolah yang mengembangkan kondisi sekolahnya yaitu dengan memberdayakan kantin dan koperasi sekolah yang sifatnya intern saja. Biaya-biaya dari pemerintah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan, mulai dari gaji pengajar sampai kebutuhan terkecil sekolah, yang biasanya disebut sebagai biaya operasional, selain itu ada juga biaya investasi, dan biaya beasiswa untuk siswa-siswa yang pandai dan yang kurang mampu dengan biaya sekolahnya.

Sebuah mutu pendidikan yang baik tentu saja di dukung oleh biaya pendidikan yang besar pula. Pembiayaan pendidikan biasanya dikelola oleh lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang diatur oleh masyarakat ataupun lembaga pendidikan yang diatur oleh pemerintah.

Manajemen sarana dan prasarana masih termasuk ke dalam sebuah ruang lingkup manajemen pendidikan dimana, pengertian dari sarana dan prasarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya sebuah tujuan pendidikan, misalnya ruang kelas, buku, perpustakaan laboratorium dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak nyata atau tidak secara langsung tetapi masih dengan tujuan yang sama, yaitu tempat, lapangan olahraga, pembiayaan dan lain sebagainya.

Berikut adalah penjelasan mengenai jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya yang berlangsung dengan proses pembelajaran dan dibedakan menjadi 3 yaitu :

- Alat pelajaran. adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik.
- Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret.
- Media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual.

Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium.
- Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

Berikutnya ada manajemen sekolah dimana di dalam manajemen sekolah memiliki banyak sekali proses manajemen diantaranya adalah Proses, dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien

Tujuan manajemen sekolah: guna membantu pencapaian visi, misi, tujuan tahunan dan program-program sekolah.

Manajemen sekolah juga memiliki fungsi-fungsi esensial sekolah, diantaranya adalah Penstrukturan waktu, penstrukturan aktivitas yang harus diikuti peserta didik, pendefinisian kecerdasan, kemampuan intelektual, prestasi dan perilaku yang baik, penilaian, pemisahan peran dan tanggungjawab antara guru dan peserta didik, supervisi dan pengawasan terhadap peserta didik, pertanggungjawaban.

Hal terakhir di dalam ruang lingkup desentralisasi pendidikan adalah hubungan baik antara kepala sekolah dan hubungan dengan masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan

kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah keberhasilan dalam mempengaruhi, menggerakkan, membimbing dan mendorong warga sekolah, baik tenaga pendidik guru, tenaga staf, siswa, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Pendidikan tanpa melibatkan peran serta masyarakat tentu akan berjalan dengan timpang, karena perwujudan pendidikan jelas diperuntukan bagi rakyat dan tentunya akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan kerja sama sekolah dengan masyarakat, ada beberapa prinsip sebagai pedoman untuk melaksanakannya. Masyarakat sekolah hendaknya benar-benar mengetahui keadaan masyarakat di daerah itu, baik sifat dan problemnya maupun sumber-sumber yang ada dalam masyarakat tersebut. Adakan survey mengenai masyarakat di daerah tertentu. Survey itu perlu untuk menghimpun informasi yang meliputi aspek kehidupan masyarakat dan kondisinya. Pengenalan dalam masyarakat merupakan bahan dalam penyusunan hasil survey yang membantu anak-anak dalam meningkatkan keingintahuan tentang orang-orang yang ada di sana, kejadian-kejadian, masa depan masyarakat, dan membangkitkan minat anak-anak untuk mengadakan penelitian tentang kesejahteraan masyarakat tersebut dan juga akan terbukanya pintu untuk kerjasama antara sekolah, wali siswa dan masyarakat.

2. Kewenangan Ruang Lingkup Desentralisasi Pendidikan

Dalam kebijakan otonomi daerah sudah menjadikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sangat luas. Seperti tercantum dalam pasal 10 ayat 3 UU No.32 tahun 2004 yang mencangkup tentang kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sedangkan di dalam pasal 14 dinyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota meliputi perencanaan dan pengendalian, pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum dan pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Kewenangan yang luas tersebut berakibat pula pada perubahan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Keuangan serta Sarana dan Prasarana pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Ruang lingkup manajemen pendidikan merupakan sebuah manajemen pendidikan yang berkaitan atau berhubungan dengan banyak sekali pihak dan multidisiplin ilmu. Ruang lingkup desentralisasi pendidikan dibagi ke dalam wilayah kerjanya, obyek garapan dan fungsi dari kegiatan tersebut. Di dalam wilayah kerjanya, ruang lingkup desentralisasi pendidikan dibagi menjadi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Lalu dalam obyek garapannya, ruang lingkup desentralisasi pendidikan dibagi ke dalam manajemen siswa, manajemen ketenagapendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen hubungan masyarakat. Terakhir, ruang lingkup desentralisasi pendidikan dapat dilihat melalui fungsi dari kegiatan tersebut di mana di dalamnya ada tentang merencanakan sebuah manajemen, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi.

REFERENSI

- Ariska, R. S. (t.thn.). MANAJEMEN KESISWAAN . 828.
- Nasbi, I. (t.thn.). Manajemen Kurikulum .
- Opan Afrudin, N. R. (2021). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN* . Bandung WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG .
- Romdloni. (2017). *PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA MELALUI MANAJEMEN KELAS* .
- Rusyadi Ananda, O. K. (2017). *MANAJEMEN SARA DAN PRASARANA PENDIDIKAN*. Medan: CV Widya Puspita.
- S Rustam Mangale, S. K. (t.thn.). *EFEKTIVITAS DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI SMA NEGRI 1 LAKEA* .
- Wati, E. (t.thn.). *MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT . SDN 01 Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong*, 659.
- Sutisna, N. W. ., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *KARIMAH TAUHID*, 1(2), 226–233. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7719>
- Siti Nurharirah, & Effane, A. (2023). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *KARIMAH TAUHID*, 1(2), 219–225. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7709>
- Anggraeni, R., & Effane, A. (2022). Peranan Guru dalam Manajemen Peserta Didik. *KARIMAH TAUHID*, 1(2), 234–239. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7701>
- Agustin, P., & Effane, A. (2022). Model Pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah. *KARIMAH TAUHID*, 1(6), 903–907. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i6.7700>
- Farah Anisa, & Effane, A. (2023). TUJUAN MANAJEMEN SEKOLAH. *KARIMAH TAUHID*, 1(1), 80–83. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7720>

- Sefhia Naila, & Effane, A. (2023). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *KARIMAH TAUHID*, 1(1), 84–89. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7715>
- Damayanti, S. D., & Effane, A. (2023). Fungsi Kewirausahaan Dalam Pendidikan . *KARIMAH TAUHID*, 1(1), 90–98. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7711>